

INTISARI

REALISASI PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN

Oleh: Indah Retno Sari¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Temanggung terhadap asas kemanfaatan untuk meninjau apakah program yang dialokasikan dengan DBH CHT sudah bermanfaat bagi petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu metode pembahasan yang digunakan untuk mengkaji kebenaran penerapan suatu ketentuan hukum menjadi kenyataan kehidupan masyarakat. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan sistematis.

Dari Hasil penelitian dan analisis pembahasan diperoleh dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pengalokasian dan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan digunakan sesuai dengan karakteristik daerah. Kesimpulan yang kedua adalah secara umum program yang dilaksanakan dengan alokasi DBH CHT sudah sesuai dan bermanfaat. Hanya saja untuk beberapa program dinilai kurang bermanfaat untuk petani tembakau karena kurangnya pelibatan petani tembakau dalam menyusun dan evaluasi program atau kegiatan.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Asas Kemanfaatan.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

THE CONFORMITY OF ALLOCATION REVENUE SHARING FUND OF

TOBACCO PRODUCTS EXCISE IN TEMANGGUNG REGENCY WITH

BENEFIT-RECEIVED PRINCIPLE OF TAXATION

By: Indah Retno Sari²

The aim of this study is to analyze the allocation of Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise in Temanggung Regency toward benefit-received principles by reviewing whether the allocated programs were beneficial mainly for tobacco farmers. The research uses normative legal methods with qualitative data analysis. The results reveal that the allocation and utilization of Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise in Temanggung Regency are in line with the applicable rules and based on characteristic of the region. However, several allocated programs are considered less advantageous for tobacco farmers such as developing infrastructure which is not directly related to the impact of cigarette smoking or conducting tobacco cultivation trainings. Those allocated programs are not precisely targeted as tobacco farmers in Temanggung are rarely asked to involve in arrangement and evaluation of such programs or activities. Therefore, the benefit-received principle is not fully achieved.

Keyword: *Revenue Sharing Fund of Tobacco Product Excise, Benefit Received Principle*

² Undegraduate Student at Law Faculty, Law Faculty Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta